

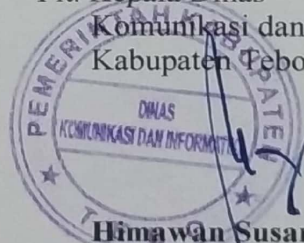
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, atas kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Melalui Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan dengan harapan agar pembaca dapat memahami upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama Kabupaten Tebo. Melalui laporan ini diharapkan agar diperoleh masukan dan saran yang positif guna perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dimasa mendatang.

Muara Tebo, 14 Januari 2019  
Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tebo



**Himawan Susanto, S.E,M, Ec, Dev**  
NIP. 197301103 200501 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Gambaran Umum OPD.....	4
1.4. Fungsi Strategis OPD .....	7
1.5. Permasalahan utama yang dihadapi.....	10
1.6. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....</b>	
3.1. Evaluasi akuntabilitas Kinerja	14
3.2. Akuntabilitas Keuangan	17
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	20
4.2. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang .....	21
<b>Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat Pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal diatas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2018, sehingga LKPj merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo sesuai dengan sistematika LKPj yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan

bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dengan adanya laporan kinerja ini dapat meningkatkan peran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk mendukung terciptanya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

## **1.2 Dasar Hukum**

Adapun ketentuan yang dijadikan dasar hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang, Unit Pelaksana teknis dinas dan Kelompok Jabatan fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a) Susunan Kepegawaian

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - Sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, terdiri dari :
  - Seksi Layanan Pengelolaan Informasi Publik;
  - Seksi Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan Data Statistik dan *e-Government*, terdiri dari :
  - Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - Seksi Pengelolaan Data Statistik.

5. Bidang Sandi Daerah, terdiri dari :

- Seksi Administrasi Persandian;
- Seksi Pembinaan Sumber daya Manusia dan Persandian;

Sedangkan untuk jumlah personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat, Pendidikan, Golongan/Ruang gaji, dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang**

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Juru Muda	I	a	0
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b	0
3.	Juru	I	c	0
4.	Juru Tingkat I	I	d	0
5.	Pengatur Muda	II	a	0
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	0
7.	Pengatur	II	c	0
8.	Pengatur Tingkat I	II	d	2
9.	Penata Muda	III	a	6
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b	1
11.	Penata	III	c	4
12.	Penata Tingkat I	III	d	2
13.	Pembina	IV	a	4
14.	Pembina Tingkat I	IV	b	0
15.	Pembina Utama Muda	IV	c	1
16.	Pembina Utama Madya	IV	d	0
17.	Pembina Utama	IV	e	0

**Tabel 1.2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4
4	Diploma Tiga (D-3)	2
5	Strata Satu (S1)	11
6	Strata Dua (S2)	3
7	Starata Tiga (S3)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>



## 1.4 Fungsi Strategis OPD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi *e-Office* antar OPD
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Terlaksananya disiplin kerja aparatur
4. Tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
5. Terlaksananya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan
6. Terlaksananya kualitas penyusunan rencana kerja OPD
7. Terwujudnya pengembangan data/informasi
8. Terbangunnya/terpeliharanya infrastruktur jaringan komunikasi sistem operasional serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

### a) Sasaran

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo merupakan penjabaran Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tebo merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait yaitu :

- Meningkatnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan organisasi
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

- Meningkatnya disiplin aparatur
- Meningkatnya keahlian/kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
- Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja OPD
- Meningkatnya pengembangan data/informasi
- Terbangunnya/terpeliharanya infrastruktur jaringan komunikasi sistem operasional serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat

#### **b) Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berdasarkan Rencana Strategis tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

1. Strategi dalam upaya tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :
  - Meningkatnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan organisasi
  - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
  - Meningkatnya disiplin aparatur
  - Meningkatnya keahlian/kompetensi sesuai dengan dengan bidang tugas yang dibutuhkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
  - Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
  - Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja SKPD
  - Meningkatnya pengembangan data/informasi

- Terbangunnya dan terpeliharanya infrastruktur jaringan komunikasi sistem operasional serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat
2. Kebijakan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut :
- Melengkapi infrastruktur penyelenggaraan administrasi pemerintahan
  - Memenuhi standar minimal sarana dan prasarana aparatur
  - Mendorong peningkatan disiplin aparatur
  - Mendorong peningkatan kualitas SDM sesuai tugas dan kompetensi
  - Mendorong peningkatan kualitas laporan capaian kinerja
  - Menyediakan pedoman dan fokus arah kebijakan organisasi
  - Meningkatkan keakuratan data/informasi
  - Mendorong penyediaan data dan informasi strategis serta keterbukaan informasi kepada publik

### **1.5 Permasalahan Utama yang dihadapi**

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo telah dilaksanakan serangkaian kajian yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan yang ada serta sejauh mungkin dapat memenuhi tuntutan segenap *stakeholders*, masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja antara lain :

1. Jumlah ASN berbasis IT belum memadai
2. Tingkat kesadaran ASN terhadap tugas pokok dan fungsi belum optimal
3. Masih rendahnya dukungan dana dari APBD sehingga program dan kegiatan belum optimal

4. Belum terbinanya koordinasi yang baik antar OPD terhadap pemahaman komunikasi dan informatika

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB.I. PENDAHULUAN**

- a. Latar belakang
- b. Gambaran umum organisasi
  - Susunan kepegawaian
  - Sarana dan prasarana
- c. Fungsi Stratetegis SKPD
  - Tujuan
  - Sasaran
  - Strategis
  - Kebijakan
- d. Permasalahan Utama yang dihadapi
- e. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERJANJIAN KINERJA**

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- b. Akuntabilitas Keuangan

### **BAB.IV. PENUTUP**

- a. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- b. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang

**BAB II**  
**PERJANJIAN KINERJA**

Penetapan Indikator kinerja sasaran merupakan hal yang harus dilakukan, guna mengukur keberhasilan yang telah dicapai, berikut adalah Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2018, sebagai berikut.

**Tabel. 2. 1. Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Persentase perangkat Daerah yang terjaring akses Fiber optik	15%
		Jumlah Personil yang mengikuti pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi	2
		Jumlah Aparatur Persandian	0
		Jumlah informasi daerah yang disebarluaskan	100%
		Persentase Cakupan jangkauan TIK	10%
		Persentase Diseminasi informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tebo	35%
		Persentase Pengamanan informasi daerah	10%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunitas Publik	Persentase informasi daerah yang dipublikasikan	70%
		Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media massa	60%
		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%
3.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase website Pemerintah daerah yang aktif yang memenuhi standar IT	10%
		Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	50%

		Persentase aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi	10%
4.	Meningkatnya Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Kabupaten Tebo yang akurat	0%
5.	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian	Persentase perangkat Daerah yang melaksanakan standar persandian	0%

**Tabel. 2.2. Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018.**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>
1	2		3
<b>1</b>	<b>Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>399.980.000</b>
1		Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.600.000
2		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	32.800.000
4		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operator	7.700.000
5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.280.000
6		Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.500.000
7		Penyediaan jasa perbaikan perlaratan kerja	20.000.000
8		Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000
9		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	15.000.000
10		Penyediaan komponen instansi listrik /penerangan bangunan	3.500.000
11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
12		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.600.000
13		Penyediaan makan dan minum	10.000.000

	14	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000
2	<b>Program Peningkatan Serana dan Praserana Aparatur</b>		<b>79.760.000</b>
	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operator	79.760.000
3	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>		<b>22.500.000</b>
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.500.000
	2	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	10.000.000
4	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>		<b>20.000.000</b>
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20.000.000
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>		<b>4.000.000</b>
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktiar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000
6	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>		<b>429.328.400</b>
	1	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang penyiaran dan kmip	16.900.000
	2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	59.500.000
	3	Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	294.803.400
	4	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	58.125.000
7	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa</b>		<b>73.250.000</b>
	5	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	73.250.000
8	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>20.000.000</b>
	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	20.000.000
9	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>		<b>20.000.000</b>
	2	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	20.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>1.068.818.400</b>



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

**3.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Pelaksanaan Evaluasi kinerja dengan pengukuran kinerja yang merupakan Penetapan Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2018.

**Tabel. 3.1. Realisasi Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018.**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Persentase perangkat Daerah yang terjaring akses Fiber optik	15%	Terealisasi pembangunan jaringan Fiber Optik	0%
		Jumlah Personil yang mengikuti pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi	2	Terlaksananya kegiatan pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi	1
		Jumlah Aparatur Persandian	0	Tersedianya aparatur persandian	1
		Jumlah informasi daerah yang disebarluaskan	100%	Tersebar nya Informasi Daerah kepada masyarakat	100%
		Persentase Cakupan jangkauan TIK	10%	Luasnya cakupan jangk TIK	10%

		Persentase Diseminasi informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tebo	35%	Terdiseminasinya informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Tebo	35%
		Persentase Pengamanan informasi daerah	10%	Terjaminnya keamanan informasi daerah	10%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunitas Publik	Persentase informasi daerah yang dipublikasikan	70%	Terpublikasikannya Informasi daerah	70%
		Persentase penyebaran informasi publik melalui media massa	60%	Tersebarluasnya informasi publik melalui media massa	60%
		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%	Tertangganya pengaduan masyarakat	0%
3.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase website Pemerintah daerah yang aktif yang memenuhi standar IT	10%	Terpenuhinya website Pemerintah daerah yang aktif sesuai standar IT	10%
		Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	50%	Berfungsinya Infrastruktur IT dengan baik	50%
		Persentase aplikasi perangkat	10%	Terintegrasinya Aplikasi	10%

		daerah yang terintegrasi		perangkat daerah	
4.	Meningkatnya Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Kabupaten Tebo yang akurat	0%	Tersedian ya data Statistik Sektoral yang akurat	0%
5.	Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian	Persentase perangkat Daerah yang melaksanakan standar persandian	0%	Terlaksananya Perangkat Daerah yang melaksanakan standar persandian	0%

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai akuntabilitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018.

Pada Tahun 2018, target realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2018 sebesar Rp. 1.068.818.400,- dan hanya terealisasi sebesar Rp. 928.589.787,- atau sekitar 86,88 persen dari target sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2017 target sebesar Rp. 2.625.501.912,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.334.749059,00,- atau sekitar 88,93 persen.

Dengan adanya peningkatan baik dilihat dari jumlah anggaran maupun prosentase fisik diharapkan akan semakin baik juga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, berikut realisasi Anggaran kegiatan tahun 2018.

**Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019.**

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>399.980.000</b>	<b>355.180.762</b>	<b>88,80</b>
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.600.000	4.094.000	89,00
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	32.800.000	29.718.458	90,61
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operator	7.700.000	2.418.400	31,41
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.280.000	58.660.000	95,72
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.500.000	31.225.000	99,13
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	14.865.000	74,33
8	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	19.999.500	99,998
9	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	15.000.000	14.048.700	93,66
10	Penyediaan komponen instansi listrik /penerangan bangunan	3.500.000	1.778.000	50,80
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	4.950.000	19,80
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.600.000	17.995.000	96,75
13	Penyediaan makan dan minum	10.000.000	8.087.850	80,88
14	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	147.340.854	98,23
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Serana dan Praserana Aparatur</b>	<b>79.760.000</b>	<b>52.873.000</b>	<b>66,29</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operator	79.760.000	52.873.000	66,29
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.495.000</b>	<b>99,98</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.500.000	12.495.000	99,96
2	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	10.000.000	10.000.000	100

4	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>		<b>20.000.000</b>	<b>19.994.800</b>	<b>99,974</b>
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20.000.000	19.994.800	99,974
5	<b>Progaram Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>		<b>4.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>37,50</b>
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktiar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	1.500.000	37,50
6	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>		<b>429.328.400</b>	<b>386.783.013</b>	<b>90,09</b>
	1	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang penyiaran dan kmip	16.900.000	13.115.000	77,60
	2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	59.500.000	50.829.500	85,43
	3	Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	294.803.400	271.210.213	92,00
	4	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	58.125.000	51.628.300	88,82
7	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa</b>		<b>73.250.000</b>	<b>49.965.112</b>	<b>68,21</b>
	5	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	73.250.000	49.965.112	68,21
8	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>20.000.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>99,00</b>
	1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	20.000.000	19.800.000	99,00
9	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>		<b>20.000.000</b>	<b>19.998.100</b>	<b>99,99</b>
	2	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	20.000.000	19.998.100	99,99
<b>Jumlah</b>			<b>1.068.818.400</b>	<b>928.589.787</b>	<b>86,88</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

LKj menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelapor atas kinerja intitusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organiasasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi, dalam masa-masa awal implementasi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2018), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJM. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan yang semakin baik.

#### **4.2. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang**

- a. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan Publik yang berkualitas berbasis teknoplogi.
- b. Strategi dan arah kebijakan yang mendukung tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat yang akurat dan akuntabel serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman tentram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat.
- c. Strategi dan arah kebijakan guna mewujudkan Keamaman informasi daerah.